



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : 108/KPN.W16-U6/SK.HM1.1/1/2025

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan standar pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/ KM A/ SK/VIII /2 022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang 22 September 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan informasi publik yang dapat diakses dan dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan kegiatan setiap unit kerja meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pengadilan;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Informasi lain yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, maka dapat ditetapkan dalam Keputusan tersendiri sebagai informasi yang dikecualikan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 21 Januari 2025



AHMAD HUSAINI

Lampiran I :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II

Nomor : 108/KPN.WI6-UI6/SK.HM1.1/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025**

- A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
- A.1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
 - 1. Profil Pengadilan, meliputi:
 - a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan
 - b. Struktur organisasi pengadilan
 - c. Alamat, telepon, faksimile, dan situs resmi pengadilan
 - d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan
 - e. Profil singkat Hakim, Pegawai dan PPNN, dan
 - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
 - 2. Prosedur cara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
 - 3. Biaya perkara di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
 - 4. Agenda sidang
- A.2. Informasi Berkaitan Dengan Hak Masyarakat
 - 1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - 2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
 - 3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
 - 4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
 - 5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
 - 6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi;
- A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
 - 1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang terdiri atas:
 - a. Nama program dan kegiatan;
 - b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya.
 - 2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris (laporan BMN)
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

A.4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
- c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
- d. Alasan penolakan permohonan informasi.

Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

B.1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
2. Informasi dalam Buku Register Perkara;
3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara;
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

B.2. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan

1. Surat Keputusan dan instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

B.3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1. Standar dan Makhumat Pelayanan Pengadilan;
2. Profil Hakim dan Pegawai;
3. Data statistik kepegawaian;
4. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
5. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

C. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;

- b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



AHMAD HUSAINI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025
PERIODE: JANUARI - DESEMBER 2025

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi	
						Aktif	Inaktif
1.	Profil pengadilan Negeri Buntok	PTIP	Kasubbag PTIP	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok	Januari-Desember	
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAP)	PTIP	Kasubbag PTIP	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember	
3	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan di Pengadilan	Umum Dan Keuangan dan PTIP	Kasubbag umum dan keuangan dan kasubbag PTIP	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember	
4	Laporan Keuangan	Umum Dan Keuangan dan PTIP	Kasubbag umum dan keuangan dan kasubbag PTIP	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember	
5	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tataaksana	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok	Januari-Desember	
6	Profil Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	Kepegawaian Organisasi dan Tataaksana	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tataaksana	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok	Januari-Desember	

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
7	Surat keputusan dan intruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok	Kepegawaian Organisasi dan Tataaksana dan PTIP	Kasubbag PTIP	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember
8	Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangan	Umum Dan Keuangan dan PTIP	Kasubag umum dan keuangan dan kasubag PTIP	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember
9	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Umum Dan Keuangan dan PTIP	Kasubag umum dan keuangan dan kasubag PTIP	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember
10	Daftar aset dan inventaris	Umum Dan Keuangan	Kasubag umum dan keuangan	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember
11	Biaya perkara di Pengadilan Negeri Buntok	Kepaniteraan Perdata	Panitera Muda Perdata	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember
12	Laporan penggunaan biaya perkara	Kepaniteraan Perdata	Panitera Muda Perdata	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember

13	Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan	Kepaniteraan Perdata dan Pidana	Panitera Perdata Panitera Pidana	Muda dan Muda	Pembaharuan setiap tahun, atau sesuai SK KPN/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember	
14	Agenda Sidang	Kepaniteraan Perdata dan Pidana	Panitera Perdata Panitera Pidana	Muda dan Muda	Pembaharuan Setiap Hari / PN Buntok	1. Elektronik di SIPP	Januari-Desember	
15	Informasi dalam Buku Register Perkara	Kepaniteraan Perdata dan Pidana	Panitera Perdata Panitera Pidana	Muda dan Muda	Pembaharuan Setiap Hari / PN Buntok	1. Elektronik di SIPP 2. Tertulis di website PN Buntok	Januari-Desember	
16	Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi)	Kepaniteraan Perdata dan Pidana	Panitera Perdata Panitera Pidana	Muda dan Muda	Pembaharuan apabila ada yang minta / PN Buntok	1. Salinan Elektronik (bukan salinan resmi)	Januari-Desember	
17	Standar dan maldumat pelayanan pengadilan	Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum dan Umum	Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum dan Kasubbag Umum dan Keuangan		Pembaharuan setiap tahun / PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember	

8	Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak- pihak ketiga	Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Umum Keuangan dan Kepegawalan	Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan dan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatakelasa	Pembaharuan setiap tahun insidentil/ PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari-Desember	
9	Bantuan Hukum Preleto	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Pembaharuan Setiap Hari/PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Secara lisan di bagian PTSP bagian perdata, pidana dan hukum	Januari-Desember	
20	Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai serta hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan Pegawai	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Pembaharuan Setiap Tahun atau sesuai SK KPN/PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Secara lisan di bagian PTSP bagian perdata, pidana dan hukum	Januari-Desember	
21	Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi serta hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Pembaharuan Setiap Tahun atau sesuai SK KPN/PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Secara lisan di bagian PTSP hukum	Januari-Desember	

22	Biaya untuk memperoleh salinan informasi	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Pembaharuan Setiap Tahun atau sesuai SK KPN/PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Secara lisan di bagian PTSP hukum	Januari - Desember	
23	Informasi laporan akses informasi	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Pembaharuan Setiap Tahun / PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok 2. Meja Informasi PTSP	Januari - Desember	
24	Data statistik perkara	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Pembaharuan Setiap Bulan / PN Buntok	1. Tertulis di website PN Buntok	Januari - Desember	
25	Informasi jadwal sidang	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Pembaharuan Setiap Hari / PN Buntok	1. PTSP Meja Hukum	Januari - Desember	
26	Laporan bulanan keadaan perkara	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Pembaharuan Setiap bulan / PN Buntok	1. PTSP Meja Hukum	Januari - Desember	



PENGADILAN NEGERI BUNTOK

AHMAD HUSAINI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

Jl. Pelita Raya No. 20 RT.33 RW.004 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan,
Kalimantan Tengah Telp. (0525) 21010, Fax. (0525) 21686 Buntok 73711
Email : pn_buntok@yahoo.co.id, pnbuntok@gmail.com Website : www.pn-buntok.go.id

A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

a. Profil Pengadilan, meliputi :

1. Fungsi, tugas dan yuridiksi Pengadilan;
2. Struktur organisasi Pengadilan;
3. Alamat, telepon, faksimili dan situs resmi Pengadilan;
4. Profil singkat pimpinan Pengadilan;
5. Daftar nama hakim di Pengadilan;
6. Daftar nama pejabat struktural, staf dan PPNPN;
7. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKKPN) di Pengadilan Negeri Buntok yang telah diverifikasi dan dikirimkan Oleh KPK, dan
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Pengadilan Negeri Buntok

b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Buntok

c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan Kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan Negeri Buntok.

d. Agenda sidang pada Pengadilan Negeri Buntok:

2. Informasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat

- a. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
- b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan aparaturnya Pengadilan;
- c. Hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan aparaturnya Pengadilan;
- d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan terhadap pelayanan informasi.
- e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
- f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan Negeri Buntok

- a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas :
 1. Nama program dan kegiatan;
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 3. Target dan atau capaian program dan kegiatan;
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya.
- b. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

- c. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - 2. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Ringkasan daftar aset dan inventaris (laporan BMN);
 - e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Informasi Laporan Akses Informasi
- Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
 - c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak, dan
 - d. Alasan penolakan Permohonan Informasi
5. Informasi Lain
- Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat di Pengadilan Negeri Buntok.
- B. Informasi yang Wajib diumumkan secara serta merta :
- 1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana informasi publik;
 - 2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
 - 3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular.
- C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh Publik
- Pengadilan Negeri Buntok mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat :
- 1. Informasi Umum
 - a. Pemohon informasi yang merupakan calon hakim dan calon ASN dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian pada tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung;
 - b. Daftar Informasi Publik (DIP);
 - 2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
 - a. Informasi dalam Buku Register Perkara;
 - b. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara;
 - c. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
 - d. Laporan penggunaan biaya perkara;
 - e. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik bukan Salinan resmi
 - 3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
 - pelaksanaan yang ditemukan pengawas sudah untuk ditindaklanjutnya; dalam pemeriksaan dugaan atau aparaturnya pengadilan yang telah diketahui publik.
 - a. Jumlah teknis dan pelanggaran umum yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
 - b. Langkah yang telah dilaksanakan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilaksanakan hakim atau aparaturnya pengadilan yang telah diketahui publik.
 - c. Jumlah hakim atau aparaturnya pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - d. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau aparaturnya pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

4. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan
 - a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah, disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan atau berdampak penting bagi publik;
 - b. Surat Keputusan dan instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantok Kelas II
5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
 - a. Standar dan Makhumat Pelayanan Pengadilan;
 - b. Profil Hakim dan Pegawai;
 - c. Data statistik kepegawaian;
 - d. Anggaran pengadilan maupun untuk pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
 - e. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOCUMENTASI (PPID),

AHMAD HUSAINI